



K

Jurnal Ilmu Administrasi Kebijakan

PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Ite Mariane

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN E-KTP TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KRAMATMULYA

Ahli Durai, Regan Vaughn

PEREBANDINGAN REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK DI VIETNAM DAN INDONESIA (STUDI KASUS PROSEDUR DALAM MEMULAI BISNIS)

Irfan Winaldi, Yaya M Abdul Aziz

IMPLIKASI, URUSAN DAN PROSPEK OTONOMI DAERAH

Isan Henri Karnadi

PENGLOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN PROGRAM ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KECAMATAN PAMENGPEUK KABUPATEN GARUT

Iteu Kanta, Aeng Utiandun, Gugur Geusan Abbar

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR DI DESA DAYEUKKOLOT

Fery Irfany Muhammad, Yaya Mulyana Abdul Aziz

Kebijakan

Volume
11

Nomor
1

Januari

2020

Program Magister Ilmu Administrasi
Program Pascasarjana Universitas Pasundan

Editors

Editor in Chief :

- Ir. Dede Zainal Arief, M.Sc. (Universitas Pasundan) ([Google Scholar](#) [Sinta](#))

Editorial Board :

- Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc., Ph.D. ([Google Scholar](#), [Scopus](#), [Sinta](#))
- Hervelly, M.P. (Universitas Pasundan) ([Scopus](#), [Sinta](#))
- Jaka Rukmana, S.T., M.T. (Universitas Pasundan) ([Google Scholar](#), [Sinta](#))
- Rini Triani, S.Si., M.Si., Ph.D (Universitas Pasundan) ([Google Scholar](#), [Scopus](#), [Sinta](#))
- Ir. Misnawi, M.Sc., Ph.D. (Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia) ([Scopus](#), [Sinta](#))
- Sandi Daniardi, Ph.D. (Balai Besar Pasca Panen)

SK Penugasan: [No. 522/Unpas-FT.D/SK/II/2020](#) tentang ***Tim Editor dan Pengelola PFTJ***

DAFTAR ISI

Articles

PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Ine - Mariane

1-17



PENGARUH KUALITAS PELAYANAN E-KTP TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KRAMATMULYA

Ahtu Duriat, Regan Vaughan

18-27



PERBANDINGAN REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK DI VIETNAM DAN INDONESIA

Irfan Winaldi

28-35



IMPLIKASI, URUSAN DAN PROSPEK OTONOMI DAERAH

Iwan Henri Kusnadi

36-46



PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN PROGRAM ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KECAMATAN PAMENGPEUK KABUPATEN GARUT

Ikeu Kania, Aceng Ulumudin, Gugun Geusan Akbar

47-51



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR DI DESA DAYEUKHKOLOT

Feny Irfany Muhammad, Yaya M Abdul Aziz

52-61

PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN PROGRAM ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KECAMATAN PAMENGPEUK KABUPATEN GARUT

Ikeu Kania¹⁾ Aceng Ulumudin²⁾ Gugun Geusan Akbar³⁾

¹⁾Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Garut
Kota Garut, Jawa Barat, Indonesia
kaniaikeu@gmail.com

²⁾Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Garut
Kota Garut, Jawa Barat, Indonesia
aceng.u@fisip.uniga.ac.id

³⁾Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Garut
Kota Garut, Jawa Barat, Indonesia
gugun.ga@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini diawali dari masalah yang dihadapi oleh aparatur desa dalam mengelola dana desa. Adapun tujuannya adalah untuk mengevaluasi pengelolaan administrasi keuangan desa di Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Garut. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan-informan kunci secara purposive seperti kepala desa, tim pelaksana ADD, anggota BPD dan tokoh masyarakat di desa yang tersebar di Wilayah Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Garut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa sumbangan pemikiran bagi aparatur desa untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya mengelola administrasi keuangan desa.

Kata Kunci : Pengelolaan, Administrasi Keuangan, Alokasi Dana Desa

PENDAHULUAN

Dewasa ini, pelaksanaan pembangunan dituntut lebih aspiratif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut maka proses pembangunan harus didasarkan pada perencanaan yang matang dan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan harus dimulai dari bawah (bottom up) dari tingkat desa atau kelurahan dengan melibatkan masyarakat secara langsung kemudian secara bertingkat pada tingkat kecamatan dan kabupaten. Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum maupun sebagai organisasi/administrasi pemerintahan, seharusnya menjadi ujung tombak dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa titik berat otonomi diletakkan pada daerah kabupaten/kota, dengan pertimbangan bahwa daerah kabupaten/kota lebih langsung berhubungan dengan masyarakat sehingga diharapkan akan dapat lebih mengerti dalam memenuhi aspirasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan saat ini yang berjalan lamban di kalangan birokrasi merupakan isu penting. Hal ini terlihat dari terjadinya tumpang tindih dalam melaksanakan program pembangunan. Akibat dari penyusunan perencanaan pembangunan yang

tidak sinergi dengan permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat. Selain itu birokrasi yang panjang dan berbelit-belit memperparah proses pembangunan saat ini.

Dalam era demokrasi, masyarakat selalu menuntut pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab dan transparan sehingga kebutuhan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah semakin tinggi. Untuk mewujudkan pembangunan desa, maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang desa sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang tentang desa.

Dalam undang-undang tersebut, desa dituntut untuk melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, dengan akurat. Desa harus mampu untuk membuat perencanaan (RPJM) desa baik dalam jangka waktu enam tahunan maupun jangka waktu satu tahunan, serta alokasi biayanya dalam APD Desa, yang merupakan kebijakan yang dituangkan dalam peraturan desa.

Pemerintah desa sedang mengelola dana yang bersumber dari APBN, yaitu Alokasi Dana Desa. Pada kenyataannya banyak aparatur desa yang belum mampu mewujudkan akuntabilitas administrasi keuangan desa. Hal ini terjadi di pemerintah desa di Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Garut terindikasi belum bisa mengalokasikan dana desa ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan aparatur desa dalam mengelola keuangan ADD.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan diantaranya: penyaluran dana dan sosialisasi, sumber daya manusia, dan yang terakhir koordinasi yang belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah. (Suparman, 2014) Berdasarkan hal itu peneliti tertarik melakukan penelitian tentang pengelolaan administrasi keuangan program ADD di wilayah Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Garut, dengan tujuan untuk mengevaluasi kegiatan pengelolaan administrasi keuangan.

LANDASAN TEORI

Dalam manajemen, pengelolaan memiliki arti yang sama sebagaimana yang dikemukakan oleh Usman (2009), yang menjelaskan bahwa kontkes keduanya mempunyai persamaan arti. Dalam manajemen terdapat beberapa fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengevaluasian sumber daya dalam mencapai keefektifan dan keefisienan sasaran. (Jauhar, 2015)

Terdapat 4 fungsi utama dalam manajemen, antara lain : (Jauhar, 2015)

- 1) Perencanaan adalah kegiatan yang dilakukan melalui rancangan penyusunan program yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi.
- 2) Pengorganisasian adalah kegiatan menyusun struktur organisasi yang dilakukan dalam rangka membuat organisasi pelaksana bagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan berupa pembagian tugas peran dan fungsi dari anggota organisasi.
- 3) Pengarahan adalah kegiatan yang dilakukan bagi anggota organisasi agar dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan.
- 4) Pegevaluasian adalah kegiatan untuk melakukan monitoring dan pengawasan serta pengendalian supaya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan

Pengelolaan ADD adalah kewenangan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa sebagaimana yang dituangkan dalam pedoman pengelolaan keuangan desa dimana seluruh kegiatan baik dari perencanaan sampai pada pelaporan merupakan tanggung jawab pemerintah desa. (Putra et al, 2013)

Pengalokasian dana desa ditetapkan 70% untuk pembiayaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan 30% lagi untuk biaya operasional pemerintahan desa untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa. (Soemantri, 2011)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan-informan kunci secara purposive seperti kepala desa, tim pelaksana ADD, anggota BPD dan tokoh masyarakat di desa yang tersebar di Wilayah Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Garut. Pada penelitian ini peneliti menggunakan model menurut Jauhar (2015) yang terdiri dari 1) Perencanaan, 2) Pengorganisasian, 3) Pengarahan dan 4) Pengevaluasian. Kemudian faktor pengambat pengelolaan administrasi keuangan program alokasi dana desa.

PEMBAHASAN

Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Garut merupakan focus dalam penelitian ini. Pengelolaan administrasi keuangan desa di wilayah Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Garut, terdiri dari kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengevaluasian :

1) Perencanaan

Di wilayah Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Garut perencanaan alokasi dana desa dilakukan dengandiawali dari pelaksanaan musyawarah stakeholder yang terlibat dalam ADD diantaranya kepala desa, tim pelaksana ADD, anggota BPD dan tokoh masyarakat di desa. Selanjutnya Musrenbangdes dilakukan pembahasan mengenai perencanaan APBDesa, yang pada akhirnya dituangkan dalam rencana pembangunan desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih kurangnya kemampuan perangkat desa dalam menyusun rencana kerja dalam pengelolaan ADD yang membuat perencanaan awal ADD jauh dari tujuan yang sudah ditetapkan. Selain itu partisipasi masyarakat desa di wilayah Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Garut dalam musyawarah desa mengenai perencanaan ADD cukup tinggi namun pemahaman masyarakat mengenai ADD yang kurang sehingga banyak usulan namun tidak paham ke arah mana pengelolaan ADD tersebut diarahkan. Usulan hanya sebatas pembangunan jalan dan irigasi.

2) Pengorganisasian

Pengorganisasian dilakukan setelah hasil dari musyawarah desa dalam perencanaan disetujui oleh seluruh stakeholder desa yang terlibat dalam pengorganisasian ADD. Pengorganisasian di laksanakan oleh seluruh aparatur desa yang ditunjuk oleh kepala desa namun dalam pelaksanaannya tidak diikuti dengan pemberian tugas pokok aparatur dalam mengelola administrasi keuangan program alokasi dana desa hal ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan aparatur desa dalam mengelola administrasi keuangan desa. Aparatur desa kurang memahami bagaimana cara mengelola administrasi keuangan desa.

3) Pengarahan

Pengarahan dilakukan setelah terbentuknya susunan organisasi yang melibatkan stakeholder desa. Maka selanjutnya dilakukan penganggaran administrasi keuangan desa. Penganggaran ADD di Kecamatan Pamengpeuk tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam aturan penganggaran

seharusnya 70% digunakan untuk pelayanan dan pemberdayaan kepada masyarakat sementara sisanya 30% dipergunakan untuk kegiatan operasional desa seperti biaya perjalanan, ATK dan lain-lain. Namun pada kenyataannya berdasarkan hasil observasi dan wawancara pihak aparat desa mengurangi porsi yang 70% tersebut dengan alasan untuk pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan dana ADD di Kecamatan Pamengpeuk secara umum diarahkan oleh pihak desa untuk pemberdayaan masyarakat seperti pembangunan jalan dan irigasi. Namun penggunaan tersebut kurang tepat mengingat masih banyaknya kemiskinan di desa, aparat desa seharusnya mengelola dana tersebut untuk pembangunan yang lebih kreatif agar dapat membantu mensejahterakan masyarakat desa seperti dibentuknya BUMdes, meningkatkan fasilitas pendidikan yang masih rendah dan ekonomi masyarakat. Hal ini perlunya peningkatan mutu SDM dalam mengelola administrasi keuangan program alokasi dana desa di Kecamatan Pamengpeuk.

4) Pengevaluasian

Pengevaluasian dilakukan dalam bentuk pengawasan dan pengendalian administrasi keuangan desa di Kecamatan Pamengpeuk dalam pelaksanaannya dilakukan agar tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan terhadap pengelolaan administrasi keuangan desa dilakukan oleh satuan organisasi pemerintah kabupaten garut dan kecamatan pamengpeuk.

Berdasarkan hasil penelitian di wilayah Kecamatan Pamengpeuk menunjukkan bahwa pelaporan dilakukan 3 kali dalam satu tahun. Selain itu pengamatan di lapangan bahwa pengawasan oleh pemerintah Kabupaten maupun Kecamatan telah sesuai dengan aturan yang berlaku, namun pihak desa memberikan laporan tidak secara berkala disebabkan oleh minimnya pengetahuan aparat desa dalam pengelolaan administrasi keuangan ADD. Sehingga pengawasan oleh pihak kabupaten dan kecamatan harus lebih di tingkatkan kualitasnya.

5) Faktor Penghambat Pengelolaan Administrasi Keuangan Program ADD Di Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Garut

Rendahnya sumber daya manusia dalam mengelola administrasi keuangan program ADD merupakan faktor penghambat dalam pengelolaan ADD di Kecamatan Pamengpeuk. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya tingkat pendidikan aparat desa yang mayoritas adalah lulusan SMP dan SMA, sementara pendidikan masyarakat mayoritas SD dan SMP. Rendahnya pendidikan ini menyebabkan kegiatan pengelolaan ADD yang belum dapat dilakukan secara maksimal.

Pada pelaksanaan perencanaan belum dilakukan dengan musrembangdes yang optimal. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya masukan atau pendapat -pendapat dari masyarakat mengenai program perencanaan yang akan dilaksanakan. Meskipun tingkat atau partisipasi kehadiran pada saat musrembangdes cukup tinggi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan ADD di Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Garut hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana ADD belum sesuai dengan peruntukannya. Kondisi di lapangan ditemukan penggunaan dana yang 30% digunakan untuk dana kegiatan operasional desa dengan jumlah melebihi dari yang seharusnya. Rendahnya sumber daya manusia dalam mengelola ADD menjadi factor penghambat dalam mengelola administrasi keuangan desa. Hal ini terlihat dari tingkat pendidikan aparat desa mayoritas adalah lulusan SMP dan SMA, sedangkan masyarakat mayoritas berpendidikan SD dan SMP. Dengan rendahnya mayoritas pendidikan aparat desa dan masyarakat desa menyebabkan dampak pada kegiatan pengelolaan ADD yang belum maksimal.

Saran dari penelitian ini agar aparaturnya desa lebih meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan ADD di wilayah Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Garut. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan jenjang pendidikan dan mengikuti pelatihan-pelatihan pengelolaan ADD.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandra Kusuma Putra, R. N. (n.d.). (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Peberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 6. Hal. 1203-1212.
- Jauhar, S. R. (2015). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prestasi Pustakakarya.
- Soemantri, B. T. (2011). *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Suparman, D. K. (2014). Implementasi Program Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. *Jurnal tesis PMIS- UNTAN-PSIAN-2014*.
- Usman, H. (2009). *Manajemen teori, praktek, dan riset pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- UU Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Mendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Kebijakan
Jurnal Ilmu Administrasi

New! - Science And Technology Index (SINTA) Version 3.0 [Click Here](#)

Journal Profile

Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi
eISSN : 26562820 | pISSN : 18295762
Universitas Pasundan

Accreditation and Indexing information:

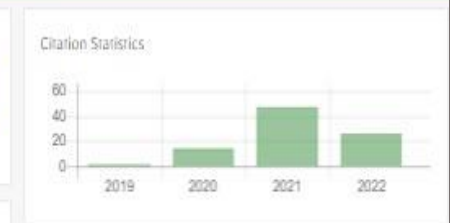
- Sinta Score: 53
- H-Index: 6
- Citations: 91
- H5-Index: 6
- 5 Year Citations: 90
- Indexed by GARUDA



Penerbit:
Universitas Pasundan

Website | Editor URL

Address:
Jalan Sumatera No. 41, Dandung Gedung Pascasarjana Lantai 3,
Ruang Prodi Administrasi dan Kebijakan Publik Principal
Fakultas Ilmu M. Asia Universitas Pasundan, Bandung



Search:

Page 1 of 4 | Total Records : 37

Publications	Citation
Pelaang Dan Tantangan Sumber Daya Manusia Di Era Disrupsi L Mullawaty Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi 10 (1), 1-9, 2019	27
Straregi kebijakan, tara kelola pemerintahan dalam penanganan covid-19 di kabupaten sumedang MTI Wilbowo, A Afriyani Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi 12 (1), 1-16, 2021	9
Peranan e- government dalam pelayanan publik (studi kasus: Mal pelayanan publik Kabupaten Sumedang) L Mullawaty, S Hendryawan Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi 11 (2), 45-57, 2020	9
Urgensi pemberdayaan penyandang disabilitas di masa pandemi AR Lutfija Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi 11 (2), 38-44, 2020	8